

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hoegeng Imam Santoso merupakan seorang putra daerah yang lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada 14 Oktober 1921. Hoegeng adalah seorang Polisi yang berpangkat Jenderal Polisi (Purn) yang menjabat pada masa Orde Baru masa jabatan 1968-1971. Sebagai polisi Hoegeng memiliki watak kepribadian tegas, bersih, dan jujur serta profesional selama menjalankan tugasnya.

Orde Baru adalah era dimulainya kepemimpinan presiden kedua Jenderal Soeharto. Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan cenderung terpusat dan terikat, kebijakan pemerintah yang diterapkan dominan menguntungkan pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru diawasi ketat oleh pemerintah pusat, seperti pemerintahan Dwi fungsi ABRI. Fungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah menciptakan keseimbangan dan ketepatan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Pengaturan kewenangan pada masa Orde Baru merupakan langkah pemerintah untuk mengontrol pemerintahan dalam satu komando yaitu pemerintah pusat. Kelebihan sistem pemerintahan sentralisasi adalah mengurangi beban pemerintah daerah dalam menanggung permasalahan yang dihadapi. Kekurangan sistem pemerintahan sentralisasi adalah dibutuhkan waktu yang lama terkait pengambilan keputusan mengenai permasalahan pemerintah daerah.

Masa pemerintahan Orde Baru dibawah komando ABRI, pemerintah Orde Baru berhasil memperkokoh keyakinan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pada masa Orde Baru salah satunya pada sektor ekonomi. Keberhasilan pembangunan tersebut memiliki dampak negatif yaitu dengan semakin ketatnya pengaturan mengenai hak-hak politik sipil. Pertumbuhan ekonomi telah melahirkan sisi negatif lainnya berupa ketimpangan sosial, ketidakadilan, ketiadaan jaminan keamanan sosial maupun budaya, dan berbagai eksese lainnya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembangunan pada masa Orde Baru pembangunan ekonomi sangat pesat hal ini menjadi celah bagi oknum pemerintahan untuk melakukan kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sistem pemerintahan terpusat dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi pejabat pemerintah pusat semakin leluasa untuk melakukan tindakan KKN.

Adanya Dwi fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru membatasi gerak Kepolisian dalam mengawasi tindakan KKN yang terjadi dalam pemerintahan. Polri dalam hal ini berada dibawah kontrol ABRI melaksanakan seluruh fungsi ABRI dan menjadi kekuatan militer pada pemerintahan. Fungsi Polri dalam hal ini dianggap kurang tepat dan tidak tepat sasaran karena selalu mengikuti komando dari ABRI.

Pemerintahan Orde Baru memiliki ciri penekanan program pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah rehabilitasi prasarana ekonomi dan pembangunan sektor pertanian. Penyediaan anggaran untuk

pembangunan Institusi Polri, seperti pembelian alat pendukung tugas dan terbatasnya anggaran kepolisian, hingga Dephankam (Institusi yang membawahi Polri) pernah berencana mengurangi jatah beras bagi anggota polisi.

Polri pada masa Orde Baru ditempatkan dalam organisasi ABRI sehingga pimpinan Polri bertanggung jawab pada Panglima ABRI, dibawah kendali ABRI, Polri terlibat dalam berbagai operasi keamanan yang bekerja sama dengan kekuatan tentara dari angkatan darat, laut, dan udara. Pada hal ini penempatan Polri dibawah kekuasaan ABRI dirasa kurang tepat, sehingga Hoengeng menyadari hal ini pada saat menjabat Kapolri ke lima.

Polisi merupakan garda depan bangsa dalam menegakkan hukum, dengan sumber daya yang dimilikinya. Polisi berusaha menangani setiap bentuk kejahatan dalam masyarakat yang semakin beragam. Metode yang digunakan selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain tugasnya sebagai Penegak Hukum, Polisi juga berperan untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Ketiga tugas ini terwujud dalam aktivitas anggota kepolisian yang selalu siap dalam menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

Jenderal polisi Hoengeng selaku Kapolri memiliki pemikiran dan kebijakan agar fungsi polisi dan ABRI terpisah dan melakukan tugasnya sesuai korpsnya masing-masing. Jenderal polisi Hoengeng mulai menugaskan dan menjalankan fungsi polisi dengan mulai melacak dan menindak pihak pemerintah

yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan suatu usaha dalam menganalisis peran Hoegeng dalam mengembalikan tugas dan fungsi Polri yang seharusnya, serta diharapkan mampu memberikan poin-poin dari sosok Hoegeng dan dijadikan figur teladan yang patut dicontoh baik kepolisian dan masyarakat umum masa kini dari sosok Hoegeng Imam Santoso yang merupakan Kapolri bersih, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugas.

Hoegeng berperan besar dalam mengembalikan profesionalisme kerja Kapolri pada masa Orde Baru yang sebelumnya dibawah kontrol ABRI. Peran Hoegeng terhadap Kapolri menarik perhatian peneliti untuk dijadikan suatu titik tolak penelitian dengan judul “Profesionalisme Polri di bawah Kepemimpinan Kapolri Hoegeng Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1971”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mencari jawabannya melalui pengumpulan data dari lapangan (Sugiyono, 2013:288). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah profesionalisme Hoegeng sebagai Kapolri pada masa Orde Baru Tahun 1968-1971. Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana profil Hoegeng?
2. Bagaimana profesionalisme Hoegeng sebagai Kapolri tahun 1968-1971?

3. Bagaimana pengaruh profesionalisme Hoegeng terhadap reputasi Polri?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang atau objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2013:38). Agar fokus penelitian lebih jelas, diperlukan penjelasan dengan mengemukakan definisi konsep atau fokus penelitian. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyajikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Profesionalisme Polri

Menurut KBBI profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan system pengajian terukur. Jika disimpulkan bahwa Polisi merupakan profesi maka profesi Polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme. Polisi memiliki arti bahwa sebagai profesi dibutuhkan upaya pemolisian profesi, karena Polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi.

Seorang Polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme bagi Polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan

dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal.

2. Kapolri Hoegeng

Profesionalisme Hoegeng sebagai Kapolri pada masa Orde Baru. Hoegeng adalah seorang Jenderal Polisi yang memimpin kepolisian Indonesia periode 1968-1971. Pada masa kepemimpinan Hoegeng Kapolri dihadapkan pada kisruh Orde Baru, sebagaimana yang telah kita ketahui pada masa ini KKN sangat merajalela dikalangan pemerintahan tidak terkecuali kepolisian. Pada masa kepemimpinan Hoegeng kepolisian dituntut untuk berperilaku jujur bersih dan konsisten dalam menjalankan tugas, menegakan hukum, memperbaiki situasi dan kondisi serta citra jatidiri polisi dimata masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Seorang peneliti ingin menggali secara luas sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto 2010:14). Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui profesionalisme Hoegeng sebagai Kapolri pada masa Orde Baru tahun 1968-1971.

Tujuan penelitian ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui profil Hoegeng.

2. Untuk mengetahui profesionalisme Hoegeng sebagai Kapolri tahun 1968-1971.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme Hoegeng terhadap reputasi Polri.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan yang berpengaruh terhadap suatu keadaan baik itu individu, masyarakat ataupun pemerintahan. Adanya penelitian maka sebuah lembaga dapat ditingkatkan mutu kinerjanya, atau dengan kata lain penelitian mempunyai manfaat sebagai pengembangan kualitas (Arikunto 2010:36). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai Profesionalisme Hoegeng sebagai Kapolri pada tahun 1968-1971. Penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan baru tentang sosok yang bersahaja, jujur, dan bermartabat serta figur teladan, yaitu jenderal polisi Hoegeng pada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur, bahan rujukan, dan tambahan ide-ide intelektual bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan membuka wawasan masyarakat dan keteladanan bagi generasi selanjutnya tentang profesionalisme Hoegeng pada masa Orde Baru.

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan pengetahuan tentang sosok Jenderal Polisi Hoengeng
- 2) Memberikan wawasan tentang kesederhanaan, kejujuran dan ketegasan dalam berkarakter

b. Bagi Kepolisian

- 1) Memberikan motivasi terhadap semua anggota Kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme anggota Polri
- 2) Memberikan contoh keteladanan dan panutan bagi seluruh jajaran Kepolisian agar bisa mengikuti jejak langkah seperti Jenderal Polisi Hoengeng

c. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pengetahuan dan pengalaman secara langsung terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa kini
- 2) Melatih menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sistematis
- 3) Memberikan pengetahuan mengenai sosok Jenderal Polisi Hoengeng